

PENILAIAN DAN PENGUSULAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL DI KAWASAN WALLACEA



LAPORAN AKHIR PROYEK
September 2019 – Februari 2020



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. INFORMASI PROYEK.....	1
II. RINGKASAN	2
III. CAPAIAN	4
IV. PEMBELAJARAN.....	1
V. STATUS KEUANGAN.....	2

I. INFORMASI PROYEK

Wilayah Pendanaan : 1. Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
2. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
3. Komplek Danau Malili, Sulawesi Selatan
4. Pulau Buano, Maluku

KBA : KBA Darat Prioritas Banggai Kepulauan, Malili, Buano, dan Pulau Flores.

Nama Proyek : Penilaian Dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Essensial di Kawasan Wallacea

Nomor Laporan : 13

Periode Waktu : September 2019 – Februari 2020

Disampaikan oleh : Zaini Rakhman (Koordinator Proyek)

Tanggal : 27 Mei 2019

Hibah CEPF:

- (a) Dalam USD: 39,886 (Tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam dolar amerika).
- (b) dalam mata uang lokal (Rp): 558.410.000., (Lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh juta rupiah).

Kontribusi mitra berupa in-kind meliputi alokasi staf, kantor, dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode proyek: September 2019 – Februari 2020

Lembaga Pelaksana (mitra): -

II. RINGKASAN

Penilaian dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kawasan Wallacea telah melalui berbagai proses yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Penilaian Dan Pengusulan KEE di Kawasan Wallacea ini merupakan hasil rangkuman dari proses kajian awal, fasilitasi, konsultasi serta audiensi/workshop/konsultasi publik yang mencakup 3 tahap.

Tahap pertama adalah kajian awal serta fasilitasi penilaian terhadap kesiapan calon KEE di kawasan Wallacea yang terdiri dari a) Konsolidasi yang dilakukan antara tim PILI dengan Burung Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 di kantor Burung Indonesia, b) Konsolidasi kedua merupakan audiensi dan koordinasi dengan Direktorat BPEE pada tanggal 26 Agustus 2019, di Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE, c) Konsolidasi pembahasan rencana audiensi dan sosialisasi kegiatan pengusulan KEE pada tanggal 26 September 2019 di kantor Burung Indonesia, d) Audiensi dan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pengusulan KEE di Kawasan Wallacea dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Makassar. Kegiatan ini dihadiri Direktur BPEE, Kepala Seksi Koridor Hidupan Liar, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Direktur PILI-Green Network, para mitra calon KEE dan UPT terkait, e) Penyusunan dokumen kajian awal Penilaian dan Pengusulan KEE di 4 lokasi terpilih.

Tahap kedua adalah konsultasi penilaian dan pengusulan KEE di 4 lokasi terpilih dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah terkait hasil temuan dari gap analisis terhadap penilaian pengusulan KEE, diantaranya: a) Banggai Kepulauan pada tanggal 25 November – 30 November 2019 di Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Salakan (Kabupaten Banggai Kepulauan), b) Pulau Buano pada tanggal 25 November – 28 November 2019 di Ambon (Provinsi Maluku) dan Piru (Kabupaten Seram Bagian Barat), c) Komplek Danau Malili pada tanggal 25 November – 2 Desember 2019 di Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), Palopo (Kabupaten Luwu), Malili, Soroako (Kabupaten Luwu Timur), d) Pulau Flores pada tanggal 15 Oktober 2019– 20 Februari 2020 di Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat). Setelah serangkaian kegiatan tersebut, PILI kembali melakukan audiensi dengan BPEE pada tanggal 7 Januari 2020 di Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE.

Tahap ketiga adalah fasilitasi pengusulan lokasi sebagai KEE yang meliputi: a) Penyusunan dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE, b) hasil Penyampaian Penilaian dan Pengusulan KEE kepada instansi terkait, c) Pendampingan dan pemantauan terhadap peninjauan bersama atas draft pembentukan dengan direktorat BPEE, Ditjen KSDAE dan konfirmasi akhir dengan pemangku kepentingan yang relevan melalui email atau diskusi dengan output persetujuan teknis dari Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE.

Dokumen Pengusulan dan Penilaian KEE di Wallacea ini terdiri dari lima bagian besar yakni: a) Bagian 1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, visi, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, serta ruang lingkup dari Pengusulan dan Penilaian KEE, b) Bagian 2. Gambaran Umum yang meliputi spesies terancam punah, potensi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, potensi ancaman terhadap Kehati, potensi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah, isu-isu strategis, pemetaan para pihak, c) Bagian 3. Kawasan Ekosistem Esensial yang terdiri dari penjelasan mengenai KEE, perjalanan

pengusulan KEE, d) Bagian 4. Profil Habitat Yang Diusulkan Sebagai KEE, e) Bagian 5. Kelembagaan Dan Kemitraan Pengelola KEE.

Sebagian besar capaian-capaian penting dari proses Penilaian dan Pengusulan KEE di Kawasan Wallacea sesuai dengan target yang menjadi indikator pencapaian kegiatan. Seluruh capaian telah terdokumentasi sebagai bentuk verifikasi pelaksanaan kegiatan. Setelah melalui serangkaian proses penilaian, di tiap lokasi penilaian dan pengusulan KEE berbeda-beda. Proses Penilaian dan Pengusulan KEE di Banggai Kepulauan telah selesai diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan melalui perda No 16 tahun 2019. Tahap selanjutnya adalah memfasilitasi DLH kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyampaian perda tersebut ke KLHK untuk ditetapkan menjadi KEE. Sedangkan proses Penilaian dan Pengusulan KEE di Pulau Buano, saat ini BAPPEDA kabupaten SBB di dampingi oleh BKSDA Ambon telah melakukan proses pengajuan KEE kepada Bupati SBB dan saat ini masih menunggu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) terkait penetapan status KEE Pulau Buano.

Penilaian dan Pengusulan KEE di Kabupaten Malili difokuskan pada Daerah Tangkapan Air Kompleks Danau Malili. Forum Kolaborasi untuk mengelola Kompleks Danau Malili tersebut telah terbentuk sejak 9 November 2017 untuk mengelola permasalahan lingkungan hidup di sekitar Kompleks Danau Malili. Proses Penilaian dan Pengusulan KEE ini bersamaan dengan pembahasan revisi RTRW Kab. Luwu Timur, sehingga perlu sinkronisasi antara pengelolaan KEE dengan rencana pengembangan wilayah. Untuk mengawal sinkronisasi antara Penilaian dan Pengusulan KEE dengan revisi RTRW diperlukan tim yang dapat berkoordinasi secara langsung dan intensif dengan tim penyusun revisi RTRW. Khusus untuk penilaian dan pengusulan KEE di Pulau Flores, saat ini BBKSDA NTT telah menyampaikan laporan dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores kepada Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE.

Perubahan asumsi dan resiko lainnya berkenaan dengan proses dan pola pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan workshop di tingkat daerah. Pihak Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE mengubah pola melalui pelibatan pihak daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam proses pelaksanaan kegiatan workshop. Perubahan ini memerlukan waktu untuk mengkondisikan dengan pihak UPT di tingkat Balai KSDA dalam membantu mendampingi pihak Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain pola ini berdampak pada tingkat partisipasi daerah meningkat dan terbangun komitmen-komitmen baru dalam mendukung pelaksanaan Pengusulan KEE.

Sebagian besar capaian-capaian kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan akhir proyek yaitu tersusunnya dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE di Kawasan Wallacea. Satu bagian dari pencapaian tujuan yang masih memerlukan pengawalan adalah payung hukum berupa SK MenLHK terhadap Usulan Lokasi KEE.

III. CAPAIAN

Tujuan dari pelaksanaan Penilaian dan Pengusulan Calon KEE di Kawasan Wallacea yaitu memetakan calon area KEE dan meninjau kesiapan dukungan kebijakan di tingkat daerah dalam pengelolaan KEE di kawasan Wallacea.

Keluaran dari pelaksanaan proyek sebagai berikut:

- a) Terfasilitasi penilaian terhadap kesiapan calon KEE di kawasan Wallacea.
- b) Terkonfirmasi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi calon KEE di kawasan Wallacea.
- c) Terfasilitasi pengusulan Mbeliling, Buano, Kepulauan Banggai, dan Komplek Danau Malili sebagai KEE.

Keluaran (a) telah dicapai oleh proyek dengan terpenuhinya aktifitas dan produk sebagai berikut:

1. Rangkaian koordinasi dengan Direktorat BPEE terkait penilaian kesiapan calon KEE di Wallacea.
2. Pemeriksaan awal terhadap data-data dan informasi atas pemenuhan proses identifikasi awal KEE.
3. Melakukan gap analisis terkait hasil penilaian kesiapan calon KEE di Wallacea.

Aktivitas 1 terpenuhi melalui capaian efektifitas pertemuan, koordinasi dan konsultasi di antara para pihak untuk proses. Kegiatan awal berupa koordinasi dengan Direktorat BPEE yang terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2019, bertempat di Ruang Ka Subdit Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE. Kegiatan ini melibatkan Ir. Mirawati Soedjono, M.A (Kepala Sub Direktorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial), dan 4 orang tim PILI.

Hal-hal penting yang terangkum dari hasil kegiatan di antaranya:

- BPEE sedang mempercepat proses Permen mengenai KEE;
- Pengusulan dan penetapan KEE yang sudah dilakukan di Mbeliling dapat dilakukan dengan Pemerintah Daerah (Penetapan KEE oleh SK. Gubernur), karena permen belum ditetapkan. Contoh penetapan KEE di Pulau Rote dengan SK Gubernur NTT nomor 204/KEP/HK/2019 (tentang KEE Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-kura leher ular rote (*Chelodina maccordi*) di Kabupaten Rote, Provinsi NTT), hal ini disarankan karena setelah permen ditetapkan, regulasi akan berubah;
- Tipologi usulan KEE di masing-masing lokasi tersebut harus jelas dideskripsikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan memperkuat pengusulan KEE tersebut;
- Ibu Mirawati menunjuk Eva Monita H sebagai nara hubung dan sebagai staff BPEE yang secara khusus akan membantu proyek pengawalan Penilaian dan Pengusulan KEE secara kolaboratif PILI dan Burung Indonesia;
- Pengaturan jadwal untuk agenda pertemuan dengan Direktur BPEE melalui PIC, disarankan setelah kepulangan beliau dari Kosta Rika (perkiraan minggu pertama bulan September 2019).

Aktivitas 1 lainnya dipenuhi melalui kegiatan Puncak agenda audiensi dan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan "Penilaian dan Pengusulan KEE di Kawasan Wallacea" dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019, Ruangan Losari C, Four Point Hotel, Makassar. Kegiatan ini dihadiri Direktur BPEE (Ir. Tandy Tjahjana, M.Si) dan Kepala Seksi Koridor Hidupan Liar (Rasyidah, SP., M. Si) Direktur Eksekutif Burung Indonesia (Dian Agista), Direktur PILI-Green Network, merangkap sebagai fasilitator acara (Iwan Setiawan), para mitra calon KEE berjumlah 28 peserta dari OPD dan LSM yang berasal dari perwakilan 4 calon KEE (4 lokasi), dan UPT terkait.

Hasil utama pertemuan tersebut diantaranya:

- a) Arahan dan paparan singkat Direktur BPEE terkait Kebijakan KEE (presentasi terkait terlampir). Catatan khusus:
 - bahwa status KEE tidak akan merubah fungsi maupun status hak/peruntukan lahan hanya saja pengelolaannya secara prinsip-prinsip konservasi yang dikelola bersama;
 - Pada saat kebakaran hutan marak terjadi, tidak terdapat hotspot diseluruh area KEE yang ada, hal ini membuktikan bahwa partisipatif para pihak efektif dalam menjaga KEE.
- b) Paparan dari Ibu Rasyidah tentang Proses Pengusulan KEE (presentasi terkait terlampir). Catatan khusus paparan di antaranya:
 - Pelibatan pemangku kepentingan kunci dalam seluruh proses penilaian dan pengusulan KEE, karena terdapat contoh KEE yang telah terbentuk ternyata ada salah satu pihak yang belum dilibatkan;
 - Tahapan pengajuan KEE fleksibel disesuaikan kondisi;
 - Pendanaan dapat berasal dari ABPN APBD maupun dari pihak ketiga;
 - Walaupun projek ini hanya sampai tahapan pengusulan KEE diharapkan ada tindak lanjut setelah ditetapkan suatu wilayah masuk dalam mekanisme KEE;
- c) Catatan khusus proses diskusi, di antaranya:
 - Pengusulan dari forum kolaborasi daerah karena forum ini yang akan mengajukan pengusulan calon KEE hal ini harus didiskusikan lebih lanjut dengan BPEE (apakah sudah ada forum kolaborasi atau belum).
 - salah satu syarat KEE adanya keanekaragaman hayati, forum sudah ada, rencana aksi sudah ada selanjutnya melalui BKSDA setempat.
 - Pusat telah mengalokasikan dana untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi KEE dengan para pemda setempat untuk kegiatan inventarisasi, BPEE dapat melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi dan apabila dari daerah membutuhkan sosialisasi maka dari pusat siap membantu dengan mengirimkan permintaan resmi kepada Dir. KEE.
 - Insentif berupa dana dekonsentrasi masih berupa rencana.
 - Apabila sudah terbentuk forum namun forum tersebut bukan dirancang awalnya untuk KEE tinggal ditambahkan konten KEE-nya atau substansi KEE dari tugas-tugas forum berikutnya.
 - Kesepakatan tentang jenis KEE tergantung kesepakatan saja (apabila calon KEE yang ada terdapat beberapa kriteria KEE tinggal dipilih salah satu kriteria saja) dan BPEE pusat akan menerima saja tinggal nanti dalam perencanaan dimasukkan sub kriteria yang ada (Lahan basah, Koridor, ABKT, Taman kehati).

- Dalam melakukan tahapan Identifikasi calon KEE, inisiasi boleh dilakukan oleh siapa saja, (contohkan pada KEE di Jambi oleh TNC atau KEE Pulau Rote oleh WCS), KEE adalah wilayahnya Pemda, UU 23 no 2014 pengelolaan kawasan ekosistem penting (esensial) dilakukan oleh pemerintah provinsi pemda kabupaten/walikota. Forum kolaborasi hanya sampai pada tahapan penetapan, nantinya pengelola di harapkan dari pihak yang memiliki hak atas lokasi tersebut atau pemerintah yang memiliki kewenangan.
- Khusus di Mbeliling, sejak 2014 BPEE sudah melakukan sosialisasi dan telah terjadi kesepakatan terutama kriteria Koridor Satwa liar untuk kakatua-kecil jambul-kuning (area tempat mencari makan untuk selanjutnya pulang lagi ke Hutan Lindung). PP 13 thn 2017 tentang tata ruang wilayah nasional bahwa apabila di area budidaya terdapat area HCV khususnya terdapat satwa liar area tersebut wajib dilindungi.
- Apabila habitat maupun spesies yang ada sudah terlindungi maka bukan merupakan kewajiban untuk dijadikan kawasan KEE (terserah stakeholders).
- Diharapkan pemda (yang mempunyai hak dan wewenang) yang melakukan kebijakan terhadap areal APL agar dapat diusulkan menjadi areal KEE.
- Inisiasi Penilaian dan Pengusulan KEE merupakan kerjasama BI dan PILI memanfaatkan fasilitas hibah kecil CEPF-Burung Indonesia, sebelumnya PILI mengusulkan KEE untuk Elang Flores sebagai tindak lanjut penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang flores.
- Dalam perkembangannya PILI dan Burung Indonesia sepakat untuk mempromosikan KBA di Wallacea. Hal pertama melakukan kajian awal berdasarkan data-data yang didapatkan dari mitra maupun UPT yang terkait. PILI bertindak sebagai auditor untuk melakukan penilaian (assessment) kesiapan suatu kawasan untuk menjadi prioritas mengikuti proses percepatan calon KEE untuk kemudian dikomunikasikan dengan BPEE untuk dijadikan agenda bersama BPEE hingga proses pengusulan.
- Dari berbagai usulan maupun pertanyaan menjadi penting untuk dibahas dan ditetapkan proses penetapannya terutama berkaitan dengan status lahan dari calon KEE sebagai contoh apabila porsinya wilayahnya sebagian besar berupa Hutan apakah penetapan melalui SK menteri atau cukup dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota? Untuk selanjutnya apabila sudah ditetapkan, apakah sudah siap petunjuk pelaksanaannya maupun teknisnya? Sehingga proses ini juga sebagai bahan masukan kepada dinas yang terkait.
- Selanjutnya tantangan terbesar adalah sesudah penetapan KEE, apa yang akan dilakukan?
- Forum ini adalah forum konsultasi untuk mendapatkan masukan dari semua pihak (untuk menjawab pertanyaan KaDis LH BangKep Bapak Ferdy).
- BPEE tetap jalan sementara Permen belum dikeluarkan karena yakin akan ditandatangani dan hanya tinggal menunggu waktu.
- Buano dapat membandingkan apakah dengan status Taman Pulau Kecil dapat menutup gap yang ada dibandingkan status KEE.
- Proses dan pengelolaan KEE tidak meninggalkan masyarakat karena KEE itu sendiri menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- PP 28 pengelolaan KSA KPA termasuk KEE, banyak payung hukum yang dapat digunakan meskipun permen KEE belum disahkan.

- Bahwa KEE di luar kawasan konservasi tapi dapat berupa koridor penghubung kawasan konservasi, khusus untuk kompleks danau Malili diperlukan diskusi lebih lanjut. Forum pengusul KEE juga mengusulkan pengelola KEE dengan syarat harus pemegang hak atas kawasan calon KEE, Pemegang Ijin, Perangkat daerah/UPT sesuai kewenangannya atau Intansi yang berwenang atas pertanahan (ATR) untuk disusulkan kepada Pemerintah daerah untuk ditetapkan. Forum Juga mengusulkan peta indikatif calon KEE untuk disetujui oleh pemerintah daerah untuk dijadikan peta definitif.
- Berkaitan dengan PT. Vale telah ada pertemuan dengan BPEE terkait dengan NKT/HCV juga akan diterapkan ABKT di areal Tambang. Intinya PT. Vale sudah mengetahui adanya mekanisme KEE.
- Informasi-informasi berkaitan dengan kepatuhan akan kesadaran lingkungan terutama berkaitan dengan PT. Vale akan mempengaruhi penilaian Proper peringkat kinerja perusahaan. KSDAE sedang mengusulkan KEE sebagai salah satu indikator proper untuk penilaian peringkat kinerja perusahaan.

Kegiatan audiensi dan koordinasi juga dilakukan dengan UPT BBKSDA NTT untuk membahas rencana sosialisasi kegiatan pengusulan KEE di Flores. Waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Starbuck, Seminyak, Denpasar, Bali. Agenda utama pertemuan tersebut untuk membicarakan, menyepakati dan memutuskan beberapa hal, di antaranya:

- BBKSDA NTT sangat mendukung rencana kegiatan Penilaian dan Pengusulan KEE.
- Kegiatan ini menjadi penting untuk mempromosikan KBA di NTT, utamanya di Flores.
- Kegiatan ini didorong untuk menjadi agenda Pemrov NTT dalam mendukung pengusulan dan penetapan Kawasan KEE di Flores.
- Kesepakatan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan penunjukkan SK Tim Pra Kondisi dalam proses Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores. Waktu pelaksanaan pada tanggal 15 Oktober 2019, di ruang pertemuan BBKSDA NTT (surat undangan terlampir).

Aktivitas 2 terpenuhi melalui capaian kajian desktop terhadap data dan informasi non spasial dan spasial atas pemenuhan proses identifikasi awal KEE dan gap analysis terkait hasil penilaian kesiapan calon KEE di Wallacea. Bagian ini menyajikan data dan informasi non-spasial dan spasial dari empat calon lokasi pengusulan KEE di kawasan Wallacea. Data dan Informasi diperoleh melalui kajian meja dengan penelusuran mandiri melalui internet maupun melalui konsultasi parapihak secara langsung dari sumber-sumber seperti OPD di 4 lokasi dan mitra Burung Indonesia seperti Perkumpulan Salanggar, Perkumpulan Wallacea, LPPM Maluku dan lainnya.

Rangkuman hasil analisis kesenjangan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Banggai Kepulauan yang diperoleh melalui penelusuran jurnal-jurnal secara daring dan juga dari mitra sebagai berikut:

- 1) Banggai Kepulauan
 - a. Kabupaten Banggai Kepulauan sudah dalam tahap pengusulan KEE melalui Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst. Secara data dan informasi,

Banggai Kepulauan sudah memenuhi syarat kelengkapan pengusulan KEE sesuai dengan Pedoman Perlindungan KEE.

- b. Pada tabel pemenuhan Indikator, total Banggai Kepulauan sebesar 75%. Walau pada kenyataannya Banggai Kepulauan sudah dalam tahap pengusulan KEE. Ini dapat diartikan data dan informasi yang di dapat oleh tim penilai kemungkinan belum terlalu lengkap atau ada hal yang tidak terdokumentasikan seperti penunjukan OPD dalam tahap inventarisasi.
 - c. Mandat diberikan langsung kepada DLH Kabupaten Banggai Kepulauan oleh Direktorat BPEE, KLHK sebagai OPD terkait yang diberi kewenangan dalam inisiasi usulan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst.
 - d. Kegiatan inventarisasi difasilitasi oleh Direktorat BPEE yang menghasilkan dokumen Penataan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan. Isi dokumen tersebut telah mencakup informasi mengenai potensi keanekaragaman hayati pada ekosistem karst Banggai Kepulauan sehingga dapat menentukan arah kebijakan pengelolaan ekosistem karst ke depan.
 - e. Forum Kolaborasi yaitu Tim Pengelolaan Karst Kabupaten Banggai, yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai no 306 tahun 2018 dengan fungsi dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan.
 - f. Pada Bagian Forum Kolaborasi, berita acara maupun hal-hal terkait dengan kesepakatan yang dibuat dalam Tim Pengelolaan Karst Kabupaten Banggai belum didapatkan oleh tim, namun mungkin sebenarnya ada pada forum. Hal ini perlu ditinjau kembali saat di lapangan.
- 2) Komplek Danau Malili
- a. Forum pengelolaan Komplek Danau Malili, yaitu Forum Pemerhati Kompleks Danau malili (FPKDM) telah terbentuk pada 9 November 2017 dengan visi Mewujudkan Kelestarian Bentang Alam Ekosistem Danau Luwu Timur. Salah satu agendanya yaitu mendorong lahirnya regulasi berupa Perda Pengelolaan/ perlindungan ekosistem dan DTA Danau. Agenda tersebut sejalan dengan rencana penilaian dan pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial di Kompleks Danau Malili dan DTA-nya.
 - b. Belum adanya kegiatan inventarisasi, yang merupakan salah satu tahapan dalam penilaian dan pengusulan KEE, yang dilakukan oleh UPT/ OPD.
 - c. Data-data keanekaragaman hayati yang telah dikumpulkan merupakan kompilasi dari berbagai jurnal dan dokumen yang diperoleh dari FPKDM. Dokumen-dokumen tersebut tidak mendokumentasikan kekayaan keanekaragaman hayati di Kompleks Danau Malili dan DTA-nya, tetapi fokus pada sebagian kecil spesies-spesies yang menjadi perhatian secara nasional atau global.
 - d. Informasi detail berkaitan dengan kondisi social, ekonomi dan budaya hanya mencakup tiga desa dan satu Dusun, yaitu Desa Tole, Desa Bantilang, Desa Nuha dan Dusun Matano di Desa Matano. Sedangkan daerah tangkapan air Kompleks Danau Malili mencakup wilayah 25 Desa dan 1 UPT Transmigrasi.
 - e. Pelibatan PT Vale, sebagai salah satu stakeholder yang berpengaruh, dalam kegiatan FPKDM untuk perlindungan DTA Kompleks Danau Malili belum maksimal.

- f. Delineasi area yang akan diusulkan menjadi KEE belum dilakukan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pemetaan partisipatif berkaitan dengan Tata Guna Lahan di Desa Tole dan Desa Nuha.
- 3) Pulau Buano
- a. Dokumen data dan informasi terkait pengusulan KEE di pulau Buano yang didapat baru pada tahap kajian terpisah. Belum ada yang menginventarisasi dan mengumpulkan data terkait kajian oleh OPD yang berwenang.
 - b. Belum ada forum kolaborasi yang terbentuk terkait dengan pengusulan KEE.
 - c. Telah dilakukan Sosialisasi Penataan dan Inisiasi Kawasan Ekosistem Esensial Ekoregion Maluku di Kota Ambon pada tanggal 15 Oktober 2018 oleh Direktorat BPEE, KLHK. Peserta yang hadir antara lain Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Burung Indonesia dan Pemerhati Lingkungan. Salah satu hasil rekomendasi dari peserta yakni Pulau Buano – KEE mangrove dan Burung Kehicap Buano, yang telah diidentifikasi memiliki potensi sebagai kawasan ekosistem esensial, akan diinventarisasi dan diverifikasi lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan dokumen pengusulan KEE.
 - d. Dari hasil sosialisasi tersebut, seharusnya ada tindak lanjut mengenai rencana usulan KEE.
 - e. Menurut konsultasi dengan Burung Indonesia dan LPPM, rencana usulan KEE ditindaklanjuti oleh Dishut Provinsi Maluku. Beberapa kali dari Dishut sudah melakukan verifikasi lapang ke Pulau Buano namun belum ada sosialisasi hasil lebih lanjut. Untuk indikatif usulan KEE data ada di Dishut.
 - f. Menurut konsultasi dengan pihak Dishut Ambon, budget untuk KEE telah dialihkan ke BKSDA Ambon sehingga kegiatan pengusulan KEE Pulau Buano tidak dapat dilanjutkan. Tim Dishut ke Buano hanya memverifikasi lokasi perjumpaan kehicap Buano. Data yang berkenaan dengan KEE yang telah dihimpun oleh Dishut belum berhasil didapatkan oleh tim Penilai.
- 4) Pulau Flores
- a. Dokumen data dan informasi terkait penilaian dan pengusulan KEE di Flores sebatas pada tahap kajian yang terpisah. Belum ada yang menginventarisasi dan mengumpulkan data terkait kajian oleh OPD yang berwenang.
 - b. Belum terbentuk forum kolaborasi yang terbentuk untuk penilaian dan pengusulan KEE. Forum yang terbentuk saat ini terbatas. Adapun Forum Peduli Bentang Alam Mbeliling (FPBAM) yang difasilitasi program Burung Indonesia Program Mbeliling tidak terkait dengan pengusulan KEE. FPBAM bertujuan untuk mendorong kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan BAM seluas 94.400 ha.
 - c. Kajian khusus mengenai keberadaan spesies terancam punah kakatua-kecil jambul-kuning dan biawak komodo dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam penilaian dan pengusulan di kawasan Mbeliling dan Kerita Mese sebagai calon KEE.
 - d. Kawasan Mbeliling menjadi habitat untuk 4 spesies burung endemik Pulau Flores dan 18 spesies endemik Nusa Tenggara. Semua jenis burung endemik Flores

terancam punah, tiga spesies di antaranya merupakan spesies dataran rendah (<1.000 mdpl) yang sangat tergantung pada hutan tropika luruh-daun dan/atau hutan semi awet hijau. Ekosistem tersebut menjadi habitat spesies burung endemik Flores yaitu kehicap flores (*Monarcha sacerdotum*), flores nuri gantung (*Loriculus flosculus*), dan gagak flores (*Corvus florensis*), serta dua spesies endemik Nusa Tenggara yang terancam punah yaitu kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), elang flores (*Nisaetus floris*), dan biawak komodo (*Varanus komodoensis*).

- e. Potensi calon KEE dari penilaian sebaran biawak komodo selain dair Kerita Mese adalah Pulau Longos dan Toro Padang yang berada di luar kawasan KSA dan KPA.

Keluaran (b) telah dicapai oleh proyek dengan terpenuhinya aktifitas dan produk sebagai berikut:

1. Konsolidasi, koordinasi, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah terkait hasil temuan dari gap analysis terhadap penilaian rencana pengusulan KEE di Flores, Komplek Danau Malili, Banggai Kepulauan, dan Pulau Buano.
2. Pengusulan KEE termasuk dokumen pendukungnya (profil KEE, rencana pengelolaan atau rencana strategis, deliniasi batas-batas wilayah KEE, serta kelembagaan forum pengelola KEE),

Aktifitas 1 terpenuhi melalui konsolidasi, koordinasi, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah terkait hasil temuan dari gap analysis terhadap penilaian rencana pengusulan KEE.

a) Banggai Kepulauan

- 1) Konsultasi dengan BKSDA Sulawesi Tengah pada tanggal 25 November 2019.
- 2) Konsultasi dengan Moh. Ihsan Nur Mallo (Universitas Tadulako) dan Dadang Dwi Putra (Celebes Birdwatching Club) pada tanggal 25 November 2019.
- 3) Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah pada tanggal 26 November 2019.
- 4) Sosialisasi Keanekaragaman Hayati dan Karst serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Bangkep 27-28 November 2019.
- 5) Kunjungan ke Desa Tatendeng dan Dusun Kokolomboi, Desa Lame-Lame Darat pada tanggal 29–30 November 2019.

Hasil-hasil penting yang terangkum dari hasil kegiatan di antaranya:

1. Kegiatan penilaian dan pengusulan KEE di Banggai Kepulauan (Bangkep) sejalan dengan agenda BKSDA Sulawesi Tengah terkait KEE di Bangkep di tahun 2020. BKSDA Sulawesi Tengah menawarkan agar PILI dapat memberikan asistensi terkait pelaksanaan program dan kegiatan KEE di Bangkep di tahun 2020.
2. Dishut Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan perlunya dibentuk tim prakondisi dalam penilaian dan pengusulan KEE di Bangkep melalui SK Kepala Dishut dan SK penetapan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Kegiatan sosialisasi keanekaragaman hayati dan karst serta rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan mendapatkan perhatian dan antusias dari perangkat desa dan Kecamatan se Kabupaten Bangkep, tokoh adat, para pemerhati dan pegiat lingkungan sebanyak 129 di hari pertama dan 80 peserta di hari kedua.

4. Pendampingan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan spesies terancam punah di Desa Tatendeng dan Leme Leme Darat telah berlangsung sejak tahun 2004. Kegiatan diawali dengan intensitas penelitian gagak banggai oleh peneliti Dr. Mochamad Indrawan, Fachry Nur Mallo, Dadang Dwi Putra dan Ichsan Nur Mallo.
 5. Perlunya perlindungan spesies-spesies endemik dan terancam punah dari berbagai taksa yang menjadi daya tarik pariwisata tingkat internasional dan dapat menjadi potensi yang dapat menaikkan tingkat perekonomian masyarakat apabila tata kelola dilaksanakan dengan baik dan terstruktur.
 6. Masih terjadi tekanan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan habitatnya yang berupa pembukaan lahan dengan pembakaran, penebangan pohon, serta perburuan satwa liar.
 7. Terdapat Lembaga Adat Togong Tanga yang diklaim sebagai Lembaga Adat di Banggai Kepulauan, Lembaga adat ini juga mendorong kepedulian terhadap pelestarian spesies terancam punah melalui pengelolaan Taman Kehati. Saat ini telah terbentuk Taman Kehati Kokolomboi seluas 52 ha.
- b) Komplek Danau Malili
- 1) Komunikasi awal dengan Kepala BBKSDA Sulawesi Selatan pada 25 November 2019.
 - 2) Konsultasi dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan pada 25 November 2019.
 - 3) Konsultasi Para Pihak dengan Anggota Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili, pada 27 November 2019.
 - 4) Konsultasi dengan empat kepala Desa Sekitar Kompleks Danau Malili, pada 28 November 2019.
 - 5) Kunjungan ke Desa Nuha, pada 28-29 November 2019
 - 6) Konsultasi dengan Staff KPH Larona-Malili, pada 29 November 2019
 - 7) Konsultasi dengan Dosen dan mahasiswa di Fakultas Kehutanan Univ. Andi Djemba, pada 30 November 2019.
 - 8) Konsultasi dengan Ketua FPKDM dan Perkumpulan Wallacea pada 30 November 2019.
 - 9) Konsultasi dan Presentasi di hadapan Kepala BBKSDA Sulawesi Selatan pada 2 Desember 2019.

Hasil-hasil penting yang terangkum dari hasil kegiatan di antaranya:

1. Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili (FPKDM) tidak dibentuk untuk melakukan kegiatan penilaian dan pengusulan KEE. Akan tetapi, FPKDM bersedia untuk diajukan sebagai forum kolaborasi dalam proses penilaian dan pengusulan KEE Kompleks Danau Malili melalui SK Bupati Luwu Timur dan/atau SK Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Tim Pra Kondisi akan dibentuk melalui SK Bupati Luwu Timur dan/atau SK Gubernur Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan dokumen penilaian dan pengusulan KEE.
3. Para pihak setuju untuk mengusulkan DTA Kompleks Danau Malili sebagai KEE dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai sektor yang ada di sekitarnya, antara lain PT Vale dan KPPN.
4. Peta Indikatif KEE diharapkan dapat dipersiapkan sebelum pembahasan Revisi RTRW Kab. Luwu Timur, sehingga KEE dapat diakomodasi ke dalam RTRW dan RPJMD serta menjadi isu strategis Kabupaten Luwu Timur.
5. Penilaian dan pengusulan KEE perlu ditunjang dengan data-data yang komprehensif.

6. Bappelitbangda akan menginisiasi pertemuan lanjutan untuk membahas dokumen penilaian dan pengusulan KEE yang direncanakan pada pertengahan bulan Desember 2019.

c) Pulau Buano

- 1) Konsultasi dengan Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya, M.S (mewakili pihak UNPATTI sekaligus Tanah Air Beta TAB dan Dr. Ir. Gun Mardiatmoko (UNPATTI) pada tanggal 25 dan 28 November 2019.
- 2) Konsultasi dengan Bapak Sadli Le (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku) dan Ibu Handerdjeta Y Tuatanasy (Kep Seksi Dishut) Provinsi Maluku pada tanggal 26 dan 27 November 2019.
- 3) Konsultasi dengan bapak Mukhtar Amin Ahmadi, SH, MSi (Kepala BKSDA Ambon) dan bapak Stefanus (Staff BKSDA Ambon) pada tanggal 27 November 2019.
- 4) Konsultasi dengan dengan LPPM, bapak Piet Wairisal (Direktur LPPM) dan Noni Tuharea (Koordinator program LPPM) pada tanggal 28 November 2019.
- 5) Konsultasi dengan Bpk. Ilham Tauda dari Bappeda Provinsi pada tanggal 28 November 2019.
- 6) Konsultasi dengan Kepala Bappeda tk. II Bpk Hasanudin Sy. Silawane dan Bpk. Nelson di fasilitasi ibu Noni Tuharea (Koordinator Program LPPM) dan ibu Vivin Widyasari (Koordinator Kemitraan Burung Indonesia untuk Maluku-Maluku Utara) pada tanggal 29 November 2019.
- 7) Konsultasi dengan dengan Vivin Widyasari (Koordinator Kemitraan Burung Indonesia untuk Maluku-Maluku Utara) pada tanggal 29 November 2019.

Hasil-hasil penting yang terangkum dari hasil kegiatan di antaranya:

1. Inisiasi pengusulan KEE telah berlangsung satu tahun lamanya yang diinisiasi Dishut Maluku, namun terhenti dikarenakan alokasi pendanaan dialihkan ke BKSDA Maluku.
2. Pemangku kepentingan mendukung proses pengusulan KEE Pulau Buano, namun komitmen nyata masih perlu pembuktian ke depannya.
3. Pertemuan yang difasilitasi oleh BKSDA pada 12 Desember 2019 di Piru, SBB akan menjadi barometer penting untuk menilai komitmen para pihak; Diperlukan konfirmasi lebih lanjut keterlibatan Burung Indonesia hasil terkait hasil-hasil pertemuan tanggal 12 Desember 2019 mengingat penerimaan dan pengakuan atas dukungan Burung Indonesia yang telah terbangun selama ini.
4. Pengusulan KEE Pulau Buano disarankan melalui SK Bupati mengingat para pihak di tingkat provinsi memiliki beberapa kendala untuk mengambil tanggung jawab dalam mengkoordinasi pengusulan KEE di Pulau Buano.
5. Status KEE akan menjadi menjadi dasar kebijakan yang terkait politik anggaran yang akan mempermudah suatu program atau kegiatan baik itu yang akan dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi lokal maupun internasional.

d) Pulau Flores, NTT

- 1) Rapat koordinasi dan pembentukan tim SK Pra Kondisi tanggal 15 Oktober 2019
- 2) Pertemuan perdana Tim Pra Kondisi Pengusulan KEE tanggal 15 November 2019

- 3) Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) konsultasi publik Penilaian dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Februari 2020,
- 4) Konsultasi Publik Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores, NTT pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Labuan Bajo.
- 5) Penyusunan dan penyampaian Rumusan Hasil Konsultasi Publik Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores yang ditujukan kepada Direktur BPEE.

Hasil-hasil penting yang terangkum dari hasil kegiatan di antaranya:

1. Kawasan Ekosistem esensial adalah sistem penyangga kehidupan yang berupa ekosistem atau wilayah yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis terancam punah. Ruang lingkup penanganan ekosistem esensial yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah ekosistem yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
2. Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE menyambut baik inisiatif pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang telah menetapkan Tim Prakondisi Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores, NTT. Pengusulan KEE ini menjadi bagian dari pencapaian 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan, utamanya di NTT dan umumnya di Indonesia.
3. Pulau Flores merupakan bagian dari wilayah Wallacea yang menyimpan keragaman hayati luar biasa. Pulau Flores termasuk salah satu dari tiga Key Biodiversity Area (KBA) di Nusa Tenggara. Sebagian besar daerah penting tersebut berada di luar sistem pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA).
4. Penilaian dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Flores, NTT mencakup area yang menjadi habitat spesies endemik dan terancam punah di Flores. Keterwakilan spesies mencakup biawak komodo, kakatua kecil jambul-kuning, elang flores, kehicap flores, serindit flores, dan gagak flores.
5. Usulan KEE terbagi ke dalam lima kluster, yaitu Bentang Alam Mbeliling, Nggorang Bowosie, Todo Repok, Pulau Longos, Pota, dan Torong Padang, Usulan area indikatif KEE seluas 140.862,9 ha yang mencakup 3 Kabupaten, 22 Kecamatan, dan 115 desa.
6. Seluruh peserta telah memahami arti penting penilaian dan pengusulan KEE di Flores serta menyepakati konsensusnya. Khusus untuk kluster Mbeliling, area indikatif KEE sesuai dengan luasan bentang alam Mbeleiling (sekitar 94.400 ha). Beberapa area yang masih menjadi konflik tenurial di areal indikatif Todo Repok untuk dikeluarkan dari area indikatif KEE.
7. Perlu intensitas untuk mengkomunikasikan hasil penilaian dan pengusulan KEE kepada masyarakat di tingkat tapak, yang menjadi bagian dari rencana aksi pengelolaan KEE di Flores, NTT.
8. Perbaiki dan penyesuaian dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE berdasarkan hasil rumusan konsultasi publik.

9. Tim Prakondisi segera akan menyampaikan Dokumen Final kepada Gubernur Proovinsi NTT
10. Tim Prakondisi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT segera menyiapkan draft Surat Keputusan Gubernur untu penetapan KEE di Flores, NTT, bersamaan dengan penetapan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE di Flores, NTT.

Aktivitas 2 dipenuhi melalui kegiatan Pengusulan KEE termasuk dokumen pendukungnya (profil KEE, rencana pengelolaan atau rencana strategis, deliniasi batas-batas wilayah KEE, serta kelembagaan forum pengelola KEE),

- a) Banggai Kepulauan : Penyampaian Dokumen Akhir Penilaian dan Pengusulan KEE di Banggai Kepulauan pada tanggal 5 Pebruari 2020, melalui nomor 019/PILI/F&A/II/2020. Laporan akhir ini ditujukan kepada Kepala Balai KSDA Sulawesi Tengah. Tembusan surat disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Sekretaris Jenderal, Ditjen KSDAE, Direktur BPEE, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Burung Indonesia
- b) Pulau Buano: Penyampaian Dokumen Akhir Penilaian dan Pengusulan KEE di Pulau Buano, NTT pada tanggal 7 Pebruari 2020, melalui nomor 020/PILI/F&A/II/2020. Laporan akhir ini ditujukan kepada Kepala Balai KSDA Maluku. Tembusan surat disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Sekretaris Jenderal, Ditjen KSDAE, Direktur BPEE, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan, Provinsi Maluku, Burung Indonesia
- c) Komplek Danau Malili: Penyampaian Dokumen Akhir Penilaian dan Pengusulan KEE di Pulau Buano, NTT pada tanggal 7 Pebruari 2020, melalui nomor 021/PILI/F&A/II/2020. Laporan akhir ini ditujukan kepada Kepala Balai besar KSDA Sulawesi Selatan. Tembusan surat disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Sekretaris Jenderal, Ditjen KSDAE, Direktur BPEE, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan, Provinsi Maluku, Burung Indonesia
- d) Flores : Penyampaian Dokumen Akhir Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores, NTT pada tanggal 6 April 2020, melalji nomor 053/PILI/F&A/V/2020. Laporan akhir ini ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT selaku Ketua Tim prakondisi Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores, NTT. Tembusan surat disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Sekretaris Jenderal, Ditjen KSDAE, Direktur BPEE, Ditjen KSDAE, Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Luwu Timur, Burung Indonesia

Keluaran (c) telah dicapai oleh proyek dengan terpenuhinya aktifitas dan produk sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pemantauan terhadap peninjauan bersama atas draft pembentukan dengan direktorat BPEE, Ditjen KSDAE dan konfirmasi akhir dengan pemangku kepentingan yang relevan melalui email atau diskusi dengan output persetujuan teknis dari Direktorat BPEE, Ditjen KSDAE
2. Penunjukan KEE oleh Menteri

Aktivitas 1 dipenuhi melalui komunikasi dengan UPT Balai KSDA dan juga OPD di tingkat terhadap perkembangan dari penyampaian dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE di masing-masing lokasi dan dengan dengan direktorat BPEE, Ditjen KSDAE

Hasil-hasil penting dari pelaksanaan kegiatan di antaranya:

- Belum ada tanggapan dan rencana lebih lanjut dari UPT di BKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Maluku, dan BKSDA Sulerwei Tengah.
- Tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bahwa Penilaian dan Pengusulan KEE di Banggai Kepulauan telah selesai diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan melalui perda No 5 dan 6 tahun 2020. Tahap selanjutnya adalah memfasilitasi DLH kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyampaian perda tersebut ke KLHK untuk ditetapkan menjadi KEE.
- Tanggapan dari Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang segera akan menyampaikan laporan dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE di Flores kepada Gubernur NTT untuk mendapatkan penetapannya.

Aktivitas 2 belum dapat dipenuhi karena beberapa hal yang mendasari di antaranya:

- KemenLHK belum mengesahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelindungan Kawasan Ekosistem Esensial. Dokumen PERMENLHK sudah final namun belum ada pengesahan.
- Atas dasar tersebut, maka beberapa daerah menginisiasi penetapan KEE cukup melalui Keputusan Gubernur dan atau Kabupaten.

IV. PEMBELAJARAN

Isu	Keberhasilan/ Kurang berhasil	Faktor penyebab	Dampak	Rekomendasi
Dukungan Kebijakan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst	Perda no 16 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst di Kabupaten Banggai Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan • Dukungan Pemprov Sulawesi Tengah • Dukungan Kajian potensi flora, fauna dan ekosistem dari LIPI 	Terbangunnya kesepahaman dari para legislatif dan eksekutif terkait kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Penetapan KEE dari Pemda kepada MenLHK • Penetapan forum kolaborasi dan rencana pengelolaan Ekosistem Karst
Pembentukan Forum Kolaborasi sebagai salah satu prasyarat Pengusulan KEE	Pembentukan Tim Prakondisi KEE Pulau Flores telah berhasil secara efektif menyiapkan dan mengajukan Dokumen Penilaian dan Pengusulan KEE	<ul style="list-style-type: none"> • Peran aktif dan partisipatif dari anggota tim prakondisi • Setiap kemajuan tahapan proses penyusunan dokumen dikomunikasikan kepada seluruh anggota tim prakondisi 	Terbangunnya kesepahaman dari para Stakeholder tentang arti penting penilaian dan pengusulan KEE	Menyegerakan proses penetapan forum kolaborasi pengelolaan KEE yang bertugas untuk menyusun dan mengawal rencana pengelolaan KEE
	Dua lokasi KEE lainnya (kecuali Buano) telah berdiri forum kolaborasi namun tidak secara spesifik terkait penilaian dan pengusulan KEE	Kurangnya sosialisasi dan kordinasi tentang KEE di kawasan yang memiliki potensi menjadi KEE	Tidak ada inisiatif dari OPD daerah dalam penilaian dan pengusulan KEE	OPD daerah dan atau UPT KSDA perlu berkordinasi secara aktif dalam proses penilaian dan pengusulan KEE di daerah
Sinkronisasi dengan RTRW Pemprov dan Pemkab	Inisiatif dari pemda provinsi dan kabupaten untuk melakukan sinkronisasi area Usulan KEE dengan Draft RTRWK.	Tuntutan revisi RTRW di Pemprov dan Pemkab	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan KEE dapat terintegrasi dengan RTRW. • Pengelolaan KEE sejalan dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah Pemprov dan Pemkab 	Menegaskan arti penting tim prakondisi dan atau forum kolaborasi untuk berkordinasi secara langsung intensif dengan Pemprov dan atau Pemkab dalam proses penilaian dan pengusulan KEE

V. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp. 528.999.706
- b. Pengeluaran : Rp. 551.496.038
- c. Saldo : (Rp. 22.496.332)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

NAMA PROGRAM : Penilaian Dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Essensial di Kawasan Wallacea
 PERIODE KONTRAK : September 2019 – Maret 2020
 NOMOR KONTRAK : No. 68/PHK-1.2.4.b/IX/2019
 NAMA/KODE DONOR : CEPF WALLACEA
 JENIS MATA UANG : IDR
 LOKASI :

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	TRANSAKSI				SALDO ANGGARAN	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Jumlah	(%)
			1	2	3	4	5	6=1-(2+3+4+5) 7=(6-1)
A	SALDO AWAL			29.170.294	4.193.031	(22.496.332)		
B	PENERIMAAN							
1	Pertama diterima tanggal 25 September 2019	167.523.000	167.523.000					0%
2	Kedua diterima tanggal 14 November 2019	180.000.000		180.000.000				0%
3	Ketiga diterima tanggal 25 November 2019	60.476.706		60.476.706				0%
4	Keempat diterima tanggal 12 Februari 2020	121.000.000			121.000.000			0%
	JUMLAH PENERIMAAN	528.999.706	167.523.000	240.476.706	121.000.000			
C	PENGELUARAN BIAYA							
I	Gaji Staff lokal	72.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000			0%
II	Operasional Kantor Program	6.000.000	554.500	2.656.000	2.242.930		546.570	9%
III	Operasional Kegiatan Program	480.410.000	113.798.206	238.797.969	121.446.433		6.367.392	1%
	TOTAL PENGELUARAN BIAYA	558.410.000	138.352.706	265.453.969	147.689.363		6.913.962	1%
D	SALDO AKHIR = A + B + C		29.170.294	4.193.031	(22.496.332)	(22.496.332)		